

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN ANGGARAN 2017**



**PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PERTANIAN**

Jalan Soekarno Hatta No. 2 Raba-Bima Kode Pos 84113 Nusa Tenggara Barat
email : dispertannakkobi@gmail.com - <http://pertanian.bimakota.go.id>
Telepon (0374) 44085 Fax. (0374) 44085



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Kota Bima berisi informasi tentang capaian kinerja selama tahun 2017, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat sasaran strategis yang harus dicapai Dinas Pertanian Kota Bima selama tahun 2017. Sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui 23 (dua puluh tiga) kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap kinerja Dinas Pertanian tahun 2017, diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian telah berhasil melaksanakan 52 (lima puluh dua) kegiatan dari 12 (dua belas) program yang ditetapkan atau sebesar 100,00%.
2. Realisasi anggaran untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima selama tahun 2017 mencapai Rp. 12.732.010.168,00,- atau 95,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 13.296.327.643,56,-.
3. Dinas Pertanian Kota Bima telah mewujudkan/mencapai indikator kinerja produksi pertanian tanaman pangan rata-rata melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 154,61%, produksi perkebunan tercapai rata-rata sekitar 83,64%, produksi peternakan tercapai rata-rata sekitar 82,89%, sedangkan untuk persentase penyuluh yang terampil dalam penerapan teknologi pertanian sesuai anjuran rata-rata sebesar 111,11%.

Penyebab dari berhasil dicapainya beberapa sasaran strategis yang telah ditentukan dipengaruhi oleh banyak faktor, dan faktor-faktor tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang baik beberapa stakeholder yang tergabung dalam rumpun hijau dalam melahirkan beberapa program/kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan petani peternak serta peningkatan kualitas sumber daya petani peternak dan aparatur pemerintah;

2. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk mempertahankan status lahan pertanian dalam upaya mempertahankan luas tanam pertanian;
3. Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/tanaman dalam upaya melestarikan sumber-sumber mata air yang dapat dipergunakan sebagai sumber air irigasi pertanian dan kebutuhan peternakan;
4. Adanya partisipasi dan komitmen dari para penyuluh dan tenaga teknis dinas untuk terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani dan ternak dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
5. Ketersediaan anggaran yang cukup dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi pertanian dan peternakan;

Penyebab dari gagal dicapainya beberapa sasaran strategis yang telah ditentukan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akibat laju pembangunan daerah perkotaan yang begitu pesat, pada beberapa lokasi, lahan-lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan karena masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
2. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian;
3. Masih kurangnya kesadaran petani dan peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai anjuran;
4. Rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi, Kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar;
5. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur, petani dan peternak;
6. Sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan yang masih terbatas.



K A T A P E N G A N T A R

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan hasil akhir dari serangkaian penyelenggaraan program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Bima sebagai manifestasi dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya dengan berpedoman pada rencana strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Dinas Pertanian Kota Bima sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disajikan beberapa hal antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan satu kesatuan instrumen yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pertanian Kota Bima.

Tentunya dalam penyusunan laporan ini mungkin masih terdapat kesalahan atau kekeliruan, oleh karena itu saran, masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan laporan ini pada tahun anggaran yang akan datang.

Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat membantu semua pihak dalam memandang kinerja Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2017.

Raba-Bima, Desember 2017

Kepala Dinas Pertanian Kota Bima,



IR. HJ. RINI INDRIATI
NIP. 19650302 198603 1 024



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Isu Strategis	34
C. Aspek Strategik Organisasi	38
BAB II PERENCANAAN KINERJA	41
A. RPJMD 2013 – 2018	41
B. Rencana Strategis Tahun 2013-2018	41
C. Rencana Kinerja	48
D. Perjanjian Kinerja	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	54
A. Pengukuran Capaian Kinerja	54
B. Realisasi Anggaran	67
BAB IV PENUTUP	71
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Tahun 2017	31
Tabel 2. Strategi dan Kebijakan SKPD	38
Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Pertanian Kota Bima.....	45
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2017	49
Tabel 5. Pencapaian Kinerja kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2017	54
Tabel 6. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2017	57
Tabel 7. Tingkat Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir	60
Tabel 8. Tingkat Produksi Perkebunan Dinas Pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir	61
Tabel 9. Tingkat Produksi Peternakan Dinas Pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir	61
Tabel 10. Penyerapan anggaran per program dan kegiatan tahun 2017	65



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Pertanian Kota Bima	73
Lampiran 2 Penetapan Kinerja Tahun 2017 Dinas Pertanian Kota Bima	74
Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2017 Dinas Pertanian Kota Bima	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *good governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Suatu keniscayaan bagi instansi pemerintah untuk mengembangkan akuntabilitas baik dalam kerangka *external accountability* maupun *internal accountability*. Instansi pemerintah adalah penerima kewenangan dan pengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat. Dalam perspektif demikian, instansi pemerintah sudah seharusnya menyampaikan informasi kinerjanya kepada publik. Sedangkan *internal accountability* adalah kegiatan instansi pemerintah berakuntabilitas dalam bingkai relasi kewenangan struktur birokrasi. Pada perspektif ini, instansi pemerintah harus menyampaikan informasi kinerjanya kepada Walikota sebagai kepala pemerintahan Kota Bima.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan



sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan serta sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2017. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran Kinerja Pokok Dinas Pertanian Kota Bima pada Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2017 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKIP Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Laporan Kinerja di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bima. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam rencana strategis Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2013–2018 khususnya pada tahun 2017.

LKIP Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2017 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017. Terkait dengan hal tersebut, LKIP Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pertanian Kota Bima dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2017.

Selain itu LKIP tahun 2017 bertujuan pula untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2013–2018.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pertanian Kota Bima adalah salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis terhadap pelaksanaan roda

pemerintahan Kota Bima yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002. Dinas Pertanian Kota Bima memiliki Potensi Sumber Daya Manusia yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, organisasi dan tatalaksana.

Perincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Bima ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183. Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima No. 88), kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian.

1. Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tupoksi.

1.1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Bima (berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 58 Tahun 2016 Pada BAB III Pasal 3 ayat (1)) terdiri dari :

- 1). Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pertanian
- 2). Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3). Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi;
 - b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 2. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 3. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan



- c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
4. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Perkebunan;
 - b. Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
5. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

4). Unit Pelaksana Teknis Dinas

5). Kelompok Jabatan Fungsional

1.2. Kedudukan

Dinas Pertanian Kota Bima merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (BAB II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perwali Nomor 58 Tahun 2016).

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi (BAB IV Pasal 4 ayat (1) Perwali Nomor 58 Tahun 2016).

1. a. Dinas Pertanian Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
- b. Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. Pengembangan prasarana pertanian;
 - d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;



- e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - f. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 - h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - k. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis pertanian;
 - l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. a. **Sekretariat** mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
 2. Pengelolaan urusan keuangan;
 3. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
 4. Pengelolaan urusan ASN; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan



ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.

B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

A. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.

B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dibidang pertanian;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang pertanian;
 - e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang pertanian;
 - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pertanian;
 - g. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - h. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - i. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. a. **Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura.



b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
2. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
6. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
7. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
8. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;

- A. Seksi Perbenihan dan Perlindungan melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan



pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.

- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;



- i. Penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- k. Menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. Penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- o. Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- p. Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- q. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- r. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura; dan



- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Produksi;

- A. Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

- A. Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - g. Fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;



- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. a. **Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan dan Kesehatan mempunyai fungsi:
- 1. Penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - 2. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - 3. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - 4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;



5. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
6. Pengawasan obat hewan;
7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
8. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
9. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
10. Pemberian rekomendasi izin di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
11. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
12. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;

- A. Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi;



- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- c. Penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. Penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- e. Penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. Penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
- g. Penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. Pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. Penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, Pakan, dan Produksi di Bidang Peternakan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kesehatan Hewan;

- A. Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.



- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. Penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. Fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. Penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. Penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. Penyiapan bahan penerbitan rekomendasi izin usaha distributor obat hewan;
 - j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. *Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.*
- A. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan



penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - c. Penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. Pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. Penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. Analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. Penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. Penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;



- i. Penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. Fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- q. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. a. **Bidang Perkebunan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 2. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
 4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 6. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 7. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 8. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang perkebunan;
 9. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan:
 - A. Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan perlindungan perkebunan.

B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- c. Penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman di bidang perkebunan;
- d. Pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang perkebunan;
- e. Sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. Penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. Penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. Penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. Penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;



- l. Pengelolaan data OPT;
- m. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. Penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- r. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Produksi Perkebunan;

- A. Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang perkebunan;



- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- d. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- e. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
- f. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

- A. Seksi Pengolahan dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang perkebunan;



- c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - d. Penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - e. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
 - f. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - g. Fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
 - h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
6. a. **Bidang Penyuluhan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:



1. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 2. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 3. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 4. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 5. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 6. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 7. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian:
 - A. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
 - B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;



- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- c. Penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- d. Penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- e. Penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- f. Penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g. Penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- h. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;

- A. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- c. Penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. Penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- e. Penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

- A. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode, dan Informasi Penyuluhan Pertanian;



- b. Penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. Penyusunan materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian;
 - d. Penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
 - e. Penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
 - f. Penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
 - g. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
7. a **Bidang Prasarana dan Sarana**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;



- d. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Lahan dan Irigasi:
 - A. Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
 - B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. Penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. Penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;



- f. Penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;

- A. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. Penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. Pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. Penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan



g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

A. Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.

B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
- c. Pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- d. Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
- f. Penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya.



8. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3). Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- 4). Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5). Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

2. Sumber Daya Organisasi

a). Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2017

No	URAIAN	Jumlah Pegawai										Ket
		Berdasarkan Jenis Kelamin			Berdasarkan Pendidikan							
		L	P	JML	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD	
1	PNS	41	49	90	1	65	4	14	6	-	-	
2	CPNS	2	5	7	-	-	1	1	5	-	-	
3	Honorer	12	5	17	-	5	-	1	7	2	2	
4	THL	8	9	17	-	4	-	2	11	-	-	
5	SMD	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
6	SUKARELA	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	
Jumlah		63	71	134	1	77	5	18	29	2	2	



Keadaan pegawai berdasarkan jabatan dan tugas adalah sebagai berikut :

1. Jabatan struktural eselon II	:	1 orang
2. Jabatan struktural eselon III	:	6 orang
3. Jabatan struktural eselon IV	:	29 orang
4. Jabatan fungsional	:	37 orang
5. Staf PNS	:	24 orang
6. Staf Non PNS	:	17 orang
7. THL PPL/Drh./SMD	:	18 orang
8. Staf Sukarela	:	2 orang
<hr/>		
Jumlah	:	134 orang

b). Sumber Daya Sarana dan Prasarana

1. Sarana

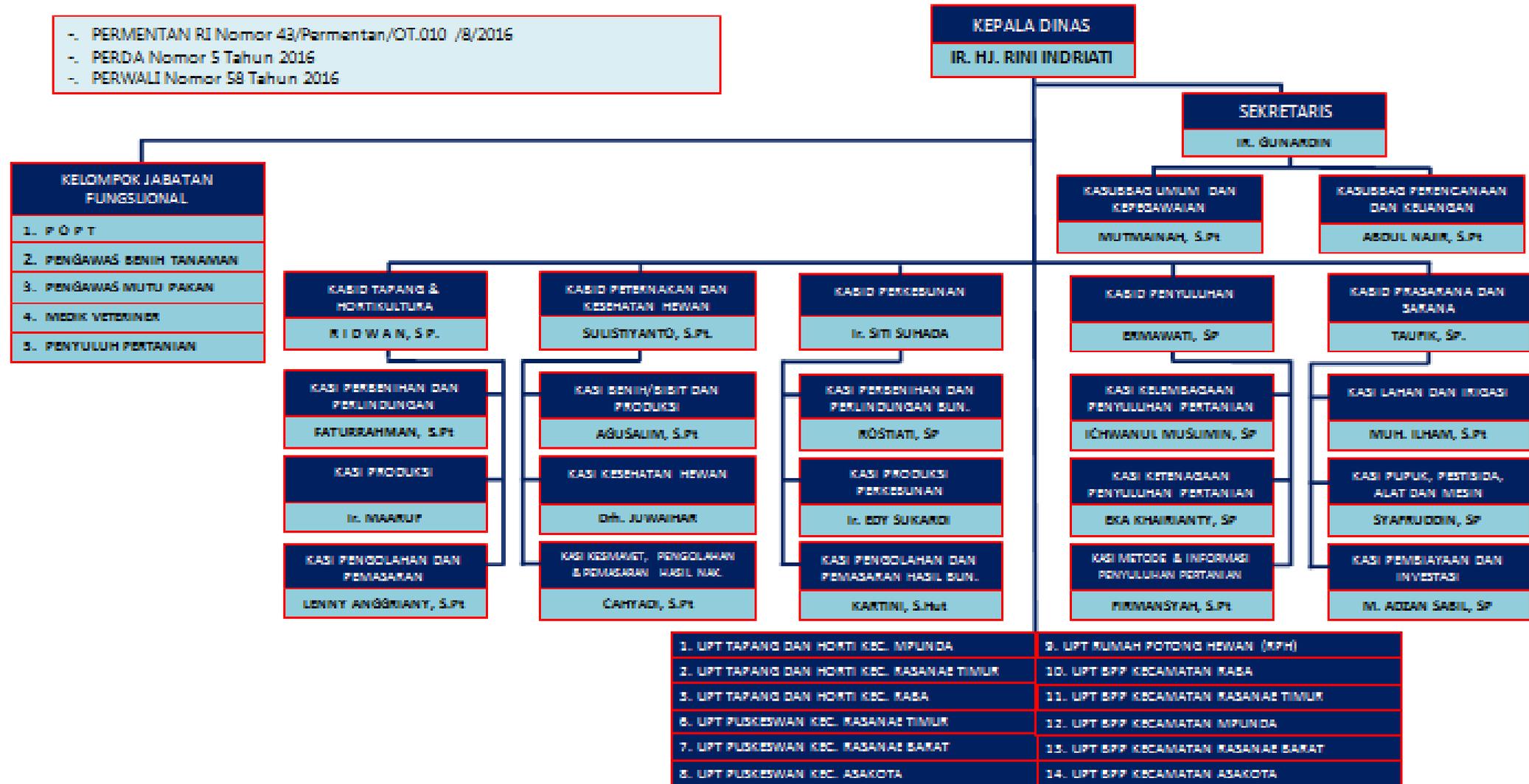
- Kendaraan dinas : Roda 4 : 4 unit
Roda 2 : 65 unit
Roda 3 : 1 unit
- Perlengkapan kantor : Meubelair dan Peralatan Elektronik

2. Prasarana

- Kantor dinas : 1 unit
- Kantor Puskesmas : 3 unit
- Kantor Unit Pelayanan IB : 1 unit
- Kantor BPP : 4 unit
- Gedung Rumah Potong Hewan : 1 unit
- Kios daging : 1 unit
- Kebun bibit : 1,2 Ha



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA BIMA



C. ISU STRATEGIS

1) Isu-Isu Pembangunan Bidang Pertanian

NTB memiliki keragaman iklim yang menguntungkan bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Posisi NTB berada pada jalur mata rantai pemasaran yang strategis, yaitu dekat dengan sentra Industri Bali dan Jawa, dan dekat dengan NTT sebagai peluang pengembangan pasar beras NTB.

Dengan posisi geografisnya yang strategis dan keragaman modal sosial yang dimilikinya, NTB berpeluang besar menjadi daerah maju yang berdaya saing. Hanya saja untuk mencapai itu, percepatan pembangunan melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal dan mendorong masuknya investasi menjadi kebutuhan mutlak.

Percepatan pembangunan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pelayanan prima menjadi salah satu ukuran utamanya. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya aparat pemerintah yang mampu memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Selain itu diperlukan pula aparat yang cakap mendorong sinergitas antara birokrasi, dunia usaha dan masyarakat khususnya di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Percepatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura bisa terealisasi jika adanya dukungan infrastruktur wilayah yang memadai. Kondisi infrastruktur strategis NTB masih belum optimal mendukung pembangunan sector perekonomian daerah khususnya pertanian yang ditunjukkan dengan masih terbatasnya infrastruktur antar wilayah dan antar sektor. Hal tersebut sering menjadi kendala masuknya investasi dibidang pertanian.

Percepatan pembangunan harus selalu berbasis pada konsepsi pembangunan berkelanjutan. NTB yang merupakan provinsi kepulauan sepatutnya memprioritaskan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang mengedepankan aspek keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dengan orientasi pada keberpihakan pada rakyat miskin.

2. Isu-Isu Pembangunan Bidang Perkebunan

Propinsi NTB telah merumuskan program pembangunan perkebunan berdimensi global, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing masyarakat.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat struktur ekonomi wilayah dan nasional. Secara ekologis berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, dan secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan salah satu komoditas pertanian yang pertumbuhannya positif terhadap pendapatan devisa negara adalah komoditas perkebunan.

Komoditas perkebunan secara ekonomi mampu bertahan pada saat krisis ekonomi terutama peluangnya dibidang ekspor, sementara itu kebijakan dasar pembangunan perkebunan mengarah kepada upaya menggerakkan dan memfasilitasi pengembangan produksi perkebunan yang berorientasi pasar melalui pemberdayaan dan penguatan hilir guna memperoleh nilai tambah dan daya saing dengan dukungan partisipasi masyarakat, beberapa komoditas unggulan di sub sektor perkebunan di wilayah NTB yang saat ini dibudidayakan antara lain kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa. Komoditas yang dibudidayakan ini, tentunya perlu didukung oleh upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas perkebunan, serta meningkatkan nilai tambah dari produk-produk perkebunan tersebut.

Secara garis besar, masalah-masalah pembangunan perkebunan yang dihadapi saat ini mencakup dua kelompok permasalahan. Selain permasalahan struktural yang berkaitan dengan program pelaksanaan pembangunan perkebunan, juga permasalahan fungsional yang terkait dengan aspek pembangunan perkebunan, yang meliputi aspek budidaya dan produktivitas, kemampuan dan pemantapan SDM petani dan petugas lapangan, penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kemitraan, oleh karenanya perlu lebih memperhatikan aspek-aspek kewilayahan dan sumber daya secara keseluruhan.



3) Isu-Isu Pembangunan Bidang Peternakan

Berdasarkan hasil analisis situasi peternakan sapi di NTB menunjukkan bahwa beberapa isu strategis yang dihadapi dalam rangka menjadikan NTB sebagai Gudang Ternak adalah :

1. Belum fokusnya program pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah.
2. Belum adanya kebijakan penguatan status lahan penggembalaan ternak rakyat.
3. Belum akuratnya pendataan populasi dasar ternak.
4. Belum maksimalnya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak.
5. Belum adanya program perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi).
6. Angka kelahiran ternak masih rendah (60% dari jumlah induk) dan angka kematian anak masih tinggi (3 % dari pedet).
7. Masih terjadinya kasus beberapa penyakit hewan menular.
8. Kemampuan transformasi teknologi (breeding, penyakit) kurang.
9. Masih minimnya perhatian terhadap kesehatan masyarakat Veteriner dan penyediaan produk yang ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan prasarana RPH dan teknologi pasca panen.
10. Beternak masih dianggap sebagai usaha sampingan.
11. Pemasaran ternak pada saat butuh uang dan tidak berorientasi harga, dan peternak sebagian besar sebagai pengadas dan tidak punya otoritas dalam menentukan penjualan ternak.
12. Akses permodalan yang masih dirasakan sulit.
13. Usaha peternakan sapi hanya berorientasi produksi daging dan belum dipadukan dengan usaha susu, energi, pupuk dan wisata.
14. Keamanan usaha sapi kurang karena banyak kasus pencurian ternak dan belum ditunjang awareness, advokasi, tertib RPH (administrasi, teknis, cap daging , razia daging legal dan ilegal dan regulasi).
15. Organisasi kelompok lemah dan mudah bubar, terutama disebabkan masalah tanah & pamswakarsa.
16. Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit, mati dan jual beli).



17. Belum semua kelompok memiliki aturan/regulasi/awig-awig (pertemuan anggota, pembagian tugas, jadwal ronda dan sanksi).
18. Kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi kandang.
19. Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan, hanya berminat pada usaha perdagangan ternak dan tidak peduli terhadap proses produks, hanya menunggu hasil.

4) Peluang

Melihat beberapa isu yang telah disampaikan di atas, ada beberapa peluang yang ada, antara lain :

- a. Adanya dukungan kebijakan pemerintah;
- b. Adanya program diklat bagi petugas;
- c. Adanya sistim koordinasi yang mulai membaik;
- d. Adanya kewenangan perencanaan dari bawah (bottom up);
- e. Mulai membaiknya kinerja dari petugas lapangan;
- f. Adanya kelembagaan petani/peternak (kelompok tani ternak) yang dinamis dan maju;
- g. Mulai adanya kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil;
- h. Tersedianya tenaga kerja terampil dan mekanisasi pertanian;
- i. Adanya potensi sumber daya alam yang memungkinkan pengembangan agribisnis;
- j. Adanya pasar yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani/peternak;
- k. Tersedianya sarana produksi yang mendorong penerapan paket teknologi anjuran;
- l. Minat masyarakat untuk berusaha tani cukup tinggi.
- m. Persentase lahan sawah 2.267 Ha merupakan irigasi dengan IP 1-3 untuk pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan.
- n. Pangsa pasar besar. Hal ini ditunjang oleh posisi Kota Bima sebagai kota transit yang berada pada segi tiga emas pariwisata (Bali–Komodo–Tanah Toraja);
- o. Jalur transportasi lancar, ditunjang oleh adanya sarana terminal dan pelabuhan laut.
- p. Jalur telekomunikasi lancar, baik melalui telepon rumah maupun telepon seluler;



- q. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan membawa konsekwensi terhadap meningkatnya jumlah permintaan akan produk-produk pertanian, baik produk mentah maupun olahan untuk pasar domestik, regional, nasional maupun ekspor.

D. ASPEK STRATEJIK ORGANISASI

Berdasarkan RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018, Misi Ke Empat yaitu “**Menjadikan Masyarakat SEJAHTERA Menjadikan Masyarakat SEJAHTERA Berbasiskan Pembangunan Ekonomi Lokal Dengan Penyediaan Infrastruktur Yang Memadai dan Diikuti Perluasan Akses Ekonomi Dalam Upaya Penguatan Struktur Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing Dengan Dukungan Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan**” merupakan acuan dasar bagi penyusunan Visi dan Misi Dinas Pertanian Kota Bima dan prioritas Dinas Pertanian Kota Bima terletak pada aspek ekonomi dalam upaya meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal.

1) Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

TUJUAN	STRATEGI
1. Meningkatnya Produksi Pertanian	1. -. Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman melalui pendekatan pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (SL-PHT, SL-PTT) yang mengacu pada budidaya tanaman sehat dan GAP/SOP; -. Pengembangan pemupukan berimbang dan pengembangan pupuk organik; -. Pengembangan Alsintan Hortikultura; -. Pengendalian OPT dan DFI; -. Pendistribusian bibit unggul kepada masyarakat peternak; -. Pengembangan infrastruktur peternakan; -. Pengembangan pakan ternak; -. Peningkatan mutu pelayanan



TUJUAN	STRATEGI
	<p>kesehatan hewan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular.</p> <p>2. -. Pengembangan kelembagaan perbenihan sebagai sentra-sentra produksi.</p> <p>- Pengembangan kelembagaan keuangan mikro bagi usaha tani dan ternak</p> <p>- Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha tani ternak</p> <p>3. Penerapan teknologi yang spesifik lokasi dan ramah lingkungan.</p> <p>4. Pemetakan/pengumpulan data tentang kebutuhan sarana dan prasarana pertanian</p> <p>5. Mendorong berkembangnya usahatani yang berorientasi agribisnis dengan menghasilkan komoditi pertanian tanaman pangan dan peternakan yang memiliki daya saing tinggi dan berorientasi pasar</p> <p>6. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam penyediaan daging yang ASUH dikonsumsi</p>

b. Kebijakan

Strategi	Kebijakan
<p>1. -. Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman melalui pendekatan pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (SL-PHT, SL-PTT) yang mengacu pada budidaya tanaman sehat dan GAP/SOP;</p> <p>- Pengembangan</p>	<p>1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan usaha budidaya masyarakat petani dan peternak</p> <p>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dan peternak dalam pemanfaatan dan penerapan usaha budidaya</p>



<p>pemupukan berimbang dan pengembangan pupuk organik;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Alsintan Hortikultura;- Pengendalian OPT dan DFI;- Pendistribusian bibit unggul kepada masyarakat peternak;- Pengembangan infrastruktur peternakan;- Pengembangan pakan ternak;- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular. <p>2. - Pengembangan kelembagaan perbenihan sebagai sentra-sentra produksi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan kelembagaan keuangan mikro bagi usaha tani dan ternak- Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha tani ternak <p>3. Penerapan teknologi yang spesifik lokasi dan ramah lingkungan.</p> <p>4. Pemetakan/pengumpulan data tentang kebutuhan sarana dan prasarana pertanian</p> <p>5. Mendorong berkembangnya usahatani yang berorientasi agribisnis dengan menghasilkan komoditi pertanian tanaman pangan dan peternakan yang memiliki daya saing tinggi dan berorientasi pasar</p> <p>6. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam penyediaan daging yang ASUH dikonsumsi</p>	<p>sesuai anjuran</p> <p>3. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi yang spesifik lokasi dan ramah lingkungan</p> <p>4. - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dibidang pertanian dan peternakan</p> <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan optimalisasi lahan dan perbaikan sumber daya air- Peningkatan rehabilitasi sarana dan prasarana dibidang pertanian dan peternakan <p>5. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan</p> <p>6. Peningkatan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk bahan makanan asal hewan</p>
--	---



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMD 2013-2018

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 yang merupakan acuan dan tolok ukur pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) tahunan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah tahun 2013-2018.

Kebijakan pembangunan nasional dibidang pertanian difokuskan pada tiga program utama, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis, dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Ketiga program utama tersebut diarahkan untuk :

1. Meningkatkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman bahan pangan dan kelembagaan pangan yang bersumber pada budaya lokal;
2. Mengembangkan sistem agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumber daya manusia; serta;
3. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan penguatan modal dan peningkatan pendapatan.

Pembangunan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis, yaitu keseluruhan kinerja sistem usaha yang saling terkait, saling bergantung dan saling mempengaruhi mulai dari sub sistem hulu, sub sistem usaha tani (*off farm*), sub sistem hilir (*on farm*) dan sub sistem penunjang yang dikembangkan secara simultan, serasi dan seimbang.

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang

dan kendala yang dihadapi. Potensi tersebut menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian Kota Bima, maka visi Dinas Pertanian Kota Bima adalah :

"Terwujudnya pembangunan pertanian yang maju dan efisien menuju masyarakat Kota Bima yang sejahtera"

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Pembangunan.** Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)" ke arah yang lebih baik.
- **Pertanian.** Dalam hal ini adalah Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Yang dimaksud adalah sistem pengusahaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang pada pokoknya terdiri atas aktivitas budidaya, dengan memanfaatkan semua potensi sumberdaya serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Di samping itu, aspek pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan merupakan aspek-aspek yang perlu diberi penekanan secara simultan. Dengan demikian, sistem pertanian secara keseluruhan yang akan dikembangkan bersifat komprehensif, berwawasan agribisnis, yang meliputi subsistem hulu (*upstream*), yakni industri input dan sarana; subsistem usahatani (*on-farm*), yakni kegiatan yang menggunakan input, sarana dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer; subsistem pengolahan/hilir (*downstream*), yakni industri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk antara atau produk akhir; subsistem pemasaran (*marketing*), yakni kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik



segar maupun olahan, dalam dan luar negeri; subsistem jasa, yakni penyediaan data bagi subsistem hulu ke hilir, seperti penelitian dan pengembangan, perkreditan, asuransi, transportasi, penyuluhan, sistem informasi, dan dukungan kebijakan pemerintah.

- **Maju dan Efisien.** Adalah adanya kesadaran dalam diri petani dan peternak Kota Bima untuk bisa mendisiplinkan diri dan mengandalkan kemampuan yang ada disekitar mereka dengan cara yang paling efektif dan efisien dengan segala sumber daya yang dimiliki maupun mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan melalui ada proses pembelajaran dalam diri dan kemauan bekerja keras sehingga pada akhirnya bisa dan mampu mencukupi, melengkapi, menyempurnakan semua kebutuhannya sehingga ketergantungan terhadap pihak diluar mereka semakin lama semakin berkurang.
- **Masyarakat.** Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah semua komponen dalam masyarakat yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam pembangunan bidang pertanian dan masyarakat antara lain petani dan peternakan, stakeholder baik pemerintah maupun pihak swasta yang memiliki perhatian dan kepedulian dalam tumbuh kembangnya usaha pertanian.

b. Misi

Peningkatan pemanfaatan sumber daya pertanian dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian melalui pengembangan sarana dan prasarana, penerapan teknologi serta menumbuh kembangkan usaha-usaha agribisnis pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan hasil produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi”.

2. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan serta sasaran program dan kegiatan pembangunan pertanian Kota Bima adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Meningkatnya Produksi Pertanian



b. Sasaran

1. Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan;
2. Meningkatnya Produksi Perkebunan;
3. Meningkatnya Produksi Peternakan; dan
4. Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Trampil.

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
SKPD DINAS PERTANIAN KOTA BIMA**

Misi ke 4 : "Menjadikan Masyarakat SEJAHTERA Berbasiskan Pembangunan Ekonomi Lokal Dengan Penyediaan Infrastruktur Yang Memadai dan Diikuti Perluasan Akses Ekonomi Dalam Upaya Penguatan Struktur Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing Dengan Dukungan Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan"

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis		Target Kinerja										
			Uraian	Indikator	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	72.635	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ton)											
				- Padi (GKP)	40.590	Ton	44.649	Ton	49.114	Ton	54.025	Ton	59.428	Ton	
				- Jagung (PK)	2.959	Ton	3.551	Ton	4.261	Ton	5.113	Ton	6.136	Ton	
	Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	204,73	Meningkatnya Produksi Perkebunan	- Kedelai (BK)	2.041	Ton	2.245	Ton	2.469	Ton	2.716	Ton	2.987	Ton	
				- Kacang Tanah (BK)	254	Ton	305	Ton	366	Ton	440	Ton	528	Ton	
				- Kacang Hijau (BK)	7	Ton	9	Ton	10	Ton	12	Ton	15	Ton	
	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	2.468	Meningkatnya Produksi Peternakan	- Ubi Kayu (UB)	1.649	Ton	1.979	Ton	2.374	Ton	2.849	Ton	3.419	Ton	
				- Ubi Jalar (UB)	84	Ton	92	Ton	101	Ton	111	Ton	122	Ton	
				Produksi Perkebunan (Ton)											
	Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Terampil	Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran	-	-	- Tembakau	-	-	-	-	-	-	3,40	Ton	3,40	Ton
					- Jambu Mente	-	-	-	-	-	-	173,84	Ton	173,84	Ton
					- Kelapa	-	-	-	-	-	-	27,49	Ton	27,49	Ton
	Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Terampil	Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran	-	-	Produksi Peternakan (Ton)										
					- Produksi Daging	1.138	Ton	1.332	Ton	1.558	Ton	1.823	Ton	2.133	Ton
- Produksi Kulit					30	Ton	34	Ton	39	Ton	45	Ton	51	Ton	
Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Terampil	Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran	-	-	- Produksi Telur	194	Ton	214	Ton	235	Ton	258	Ton	284	Ton	
				-	-	-	-	-	-	45	%	50	%		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



3. Kebijakan dan Program

Pada Tahun 2017 Dinas Pertanian Kota Bima dalam mengemban tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service);
 - 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 8) Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan;
 - 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 12) Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
 - 14) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
 - 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - 3) Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - 4) Pengadaan Meubelair;
 - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :
 - 1) Pendidikan dan pelatihan formal;
 - 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Pelaksanaan Penilaian AKJG.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan:
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - 3) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 4) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah;



- 5) Penyusunan LKIP, LPJ dan LPPD.
- f. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan:
 - 1) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis;
 - 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis;
 - 3) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani;
 - 4) Pelaksanaan PEDANA PENAS dan Kontak Tani Andalan; dan
 - 5) Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani, Petani, Kelompok PUAP dan Pekarangan.
- g. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan:
 - 1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian;
 - 2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
 - 3) Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija;
 - 4) Pengembangan Perbibitan/Perbenihan;
 - 5) Pengembangan Sistem Informasi Pasar;
 - 6) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian;
- h. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna; dan
 - 2) Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna;
- i. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan:
 - 1) Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
 - 2) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan; dan
 - 3) Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan.
- j. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dengan kegiatan:
 - 1) Penyusunan program penyuluhan pertanian.
- k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan kegiatan:
 - 1) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular;
 - 2) Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah; dan
 - 3) Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan.
- l. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan:
 - 1) Pembibitan dan Perawatan Ternak;
 - 2) Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak;
 - 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan.



C. RENCANA KINERJA

Dalam tahun 2017, Dinas Pertanian Kota Bima telah melaksanakan 52 (lima puluh dua) kegiatan yang didukung oleh 12 (dua belas) program guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan sejumlah kegiatan tersebut tentu diperlukan sumber dana sebagai salah satu prasyarat keberhasilan suatu rencana. Dana tersebut juga merupakan salah satu unsur *input* yang harus dipenuhi dan mempunyai tolok ukur tersendiri. Dengan demikian mudah dipahami bahwa dalam menyusun Rencana Strategik dan Rencana Kinerja Tahunan, tidaklah terlepas dari sistem penganggaran pada organisasi Dinas Pertanian Kota Bima.

Pada prinsipnya Rencana Kinerja Tahunan tahun 2017 ini akan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanian Kota Bima selama tahun 2017. Target kinerja menggambarkan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada setiap kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pertanian Kota Bima dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Tujuan adalah hasil yang akan diwujudkan dalam jangka waktu menengah, sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan untuk kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.



Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018, disusunlah Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Bima yang merupakan perjanjian kerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Walikota sebagai pengambil kebijakan dengan pimpinan SKPD sebagai pelaksana kebijakan yang akan dijadikan tolok ukur dalam pengukuran kinerja Pemerintah Kota Bima.

Dinas Pertanian Kota Bima telah membuat penetapan kinerja tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2017. Penetapan kinerja Dinas Pertanian tahun 2017 disusun didasarkan pada Rencana Kinerja 2017 yang telah ditetapkan.

Perjanjian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2017 didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Bima yang telah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bima yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2013-2018, dan adapun penetapan kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2017

SASARAN STRATEGIS		
1. Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan;		
2. Meningkatnya Produksi Perkebunan;		
3. Meningkatnya Produksi Peternakan;		
4. Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Trampil.		
Indikator Kinerja	Satuan	Target
Produksi Pertanian Tanaman Pangan :		
- Padi (GKP)	Ton	54.025
- Jagung (PK)	Ton	5.113
- Kedelai (BK)	Ton	2.716
- Kacang Tanah (BK)	Ton	440
- Kacang Hijau (BK)	Ton	12
- Ubi Kayu (UB)	Ton	2.849
- Ubi Jalar (UB)	Ton	111



SASARAN STRATEGIS		
Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan; 2. Meningkatnya Produksi Perkebunan; 3. Meningkatnya Produksi Peternakan; 4. Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Trampil.		
Produksi Perkebunan :		
-. Tembakau	Ton	3,40
-. Jambu Menté	Ton	173,84
-. Kelapa	Ton	27,49
Produksi Peternakan :		
-. Produksi Daging	Ton	1.823
-. Produksi Kulit	Ton	45
-. Produksi Telur	Ton	258
Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Trampil	%	45

Penjelasan atas Indikator Kinerja di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis : 1. *Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan*; 2. *Meningkatnya Produksi Perkebunan*; 3. *Meningkatnya Produksi Peternakan*; dan 4. *Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Trampil*, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

- Produksi Pertanian Tanaman Pangan* : adalah upaya yang dilaksanakan oleh SKPD dalam menjamin ketersediaan bahan pangan masyarakat dengan cara melaksanakan intensifikasi tanaman pangan ditengah kondisi lahan pertanian yang semakin berkurang.
Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan).
- Produksi Perkebunan* : adalah upaya yang dilaksanakan oleh SKPD dalam menjamin ketersediaan hasil perkebunan masyarakat dengan cara melaksanakan intensifikasi tanaman perkebunan.
Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan.
- Produksi Peternakan* : adalah upaya yang dilaksanakan oleh SKPD dalam menjamin ketersediaan bahan pangan asal ternak masyarakat dengan cara melaksanakan intensifikasi peternakan.



Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

4. Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Trampil : adalah upaya yang dilaksanakan oleh SKPD dalam menjamin ketersediaan penyuluh yang terampil dalam pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi hasil pertanian secara keseluruhan.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut diatas, jumlah anggaran program/kegiatan yang digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2017 adalah Rp. 5.207.402.900,-, dengan jumlah realiasi sebesar Rp. 5.068.205.677,- atau sebesar 97,33%, adapun program/kegiatannya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ditunjang oleh 5 (lima) kegiatan dengan total realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 509.367.700,-, rincian kegiatannya :
 - 1) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, dengan anggaran Rp. 36.132.900,-.
 - 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis, dengan anggaran Rp. 117.126.000,-.
 - 3) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, dengan anggaran Rp. 7.365.000,-.
 - 4) Pelaksanaan PEDANA PENAS dan Kontak Tani Andalan, dengan anggaran Rp. 278.798.800,-.
 - 5) Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani, Petani, Kelompok PUAP dan Pekarangan, dengan anggaran Rp. 69.945.000,-.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan ditunjang oleh 6 (enam) kegiatan dengan total realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 3.439.964.227,-, rincian kegiatannya :
 - 1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian, dengan anggaran Rp. 122.080.077,-.



- 2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian, dengan anggaran Rp. 34.095.800,-.
 - 3) Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija, dengan anggaran Rp. 126.733.700,-.
 - 4) Pengembangan Perbibitan/Perbenihan, dengan anggaran Rp. 211.576.000,-.
 - 5) Pengembangan Sistem Informasi Pasar, dengan anggaran Rp. 51.998.000,-.
 - 6) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, dengan anggaran Rp. 2.893.480.650,-.
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan dengan total realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 61.870.650,-, rincian kegiatannya :
- 1) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, dengan anggaran Rp. 42.636.900,-.
 - 2) Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna, dengan anggaran Rp. 19.233.750,-.
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan ditunjang oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 234.969.300,-, rincian kegiatannya :
- 1) Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan anggaran Rp. 48.582.000,-.
 - 2) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan anggaran Rp. 39.515.000,-.
 - 3) Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, dengan anggaran Rp. 146.872.300,-.
5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan dengan total realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 76.317.000,-, rincian kegiatannya :
- 1) Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, dengan anggaran Rp. 76.317.000,-.
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak ditunjang oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 411.968.400,-, rincian kegiatannya :



- 1) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular, dengan anggaran Rp. 252.631.000,-.
 - 2) Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah, dengan anggaran Rp. 64.262.900,-.
 - 3) Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan, dengan anggaran Rp. 95.074.500,-.
7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan ditunjang oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 333.748.400,-, rincian kegiatannya :
- 1) Pembibitan dan Perawatan Ternak, dengan anggaran Rp. 71.519.900,-.
 - 2) Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak, dengan anggaran Rp. 17.448.500,-.
 - 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan, dengan anggaran Rp. 244.780.000,-.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

1. Pengukuran Capaian Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian Kota Bima. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari sumber internal dan eksternal, baik data primer maupun sekunder.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan,

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2017 dengan realisasi yang diperoleh pada akhir tahun anggaran, komponen yang diukur kinerjanya adalah kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2017 tersebut berdasarkan hasil pengukurannya dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3. Pencapaian kinerja kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2017

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1	2	3
1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Para Pelaku Usaha Pertanian Sebanyak 20 Orang.
2	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Pelaksanaan Latihan dan Kunjungan serta Rembug Tani sbanyak 20 kali
3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kelompok tani yang mengikuti koordinasi koordinasi pengembangan PUAP adalah 30 klp



No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1	2	3
4	Pelaksanaan PEDANA/PENAS dan Kontak Tani Andalan	Petani yang mewakili Kota Bima dalam pelaksanaan PENAS sebanyak 5 Orang
5	Pelaksanaan Lomba Bagi Kelompok Tani Dan Petani, Klp. PUAP Serta Pekarangan	Jumlah kelompok tani yang berpartisipasi adalah sebanyak 10 Kelompok
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Pelaksanaan penyaluran kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai prosedur dan tepat sasaran, dengan jumlah penyaluran Pupuk bersubsidi sebanyak 3.324,25 Kg
7	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani Peternak Tentang Penanganan Pasca Panen Sebanyak 50 Orang
8	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Pelaksanaan Gerakan Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dan Penyusunan Proksimantap.
9	Pengembangan Perbinihan/ Perbibitan	Tersalurnya Bantuan Bibit Benih Padi Gogo : 1500 Kg, Bibit Tanaman Sawo : 1000 Pohon, Mangga : 700 Pohon, Alpukat : 700 Pohon, Durian : 1000 Pohon dan Klengkeng : 400 Pohon.
10	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Tersajinya informasi harga pasar komoditi pertanian di media cetak lokal sebanyak 48 kali
11	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani di 7 Lokasi • Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Embung di 5 Lokasi • Terlaksananya Kegiatan Perbaikan DAM Parit di 2 Lokasi • Terlaksananya Pengembangan Air Irigasi Tanah Dangkal di 4 (empat) Kecamatan yang tersebar di 20 Lokasi • Terlaksananya Penyaluran Alsintan sebanyak 80 Unit
12	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah klp yang mengikuti pelatihan menerapkan teknologi pertanian tepat guna (PHT) = 2 Klp
13	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah kelompok yang dilatih pada kegiatan Demplot Padi = 1 Klp
14	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah petani yang ikut pelatihan rorak dan biopori sebanyak 40 Orang
15	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/perkebunan	Jumlah alsintan yang disalurkan adalah 80 Unit
16	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan	Jumlah bibit unggul yang disalurkan adalah Jambu Menté 12.000 Pohon dan Kemiri 4.000 Pohon
17	Penyusunan Program penyuluhan pertanian	Jumlah program adalah sebanyak 8 program
18	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	<p>Jumlah pelayanan kesehatan hewan oleh Puskesmas sebanyak 1531 ekor terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapi : 646 ekor • Kerbau : 1 ekor • Kuda : 60 ekor • Kambing : 534 ekor • Kucing : 27 ekor • Ayam : 262 ekor • Anjing : 1 ekor • Rusa : - ekor <p>Perincian Pelaksanaan Vaksinasi ternak :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapi : 9.842 ekor • Kerbau : 160 ekor • Kuda : 419 ekor • Kambing : 7.954 ekor • Domba : 13 ekor <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Total : 18.388 ekor <p>Diagnosa penyakit 824 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE : - kasus • AT : - kasus • Scabies : 248 kasus • ND : - kasus • MCF : - kasus • Diare : - kasus • BEF : - kasus



No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Helmi : 90 kasus • Myas : 1 kasus • CRD : 6 kasus • Indig : 20 kasus • Maln : 365 kasus • DFI : - kasus • Dematitis : 11 kasus • ARTR : 15 kasus • Abses : 12 kasus • Tymp : 3 kasus • VUL : 1 kasus • Mastitis : 2 kasus • Pneu : 48 kasus • Disto : 2 kasus • Infla : - kasus <p>Situasi umum penyakit hewan menular berdasarkan jenis penyakit adalah sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anthrax : - kasus • Surra : - kasus • Scabies : 2 kasus • ND : - kasus • AI : - kasus <p>Pengawasan Hewan/ Daging Qurban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dan pemeriksaan fisik (<i>ante mortem</i>) dilaksanakan H-1 2. Pengawasan dan pemeriksaan (<i>post mortem</i>) selama 3 hari, Tgl. 1 – 3 Sept. 2017 <p>Jumlah ternak qurban yang diawasi dan diperiksa sebanyak 975 ekor terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapi : 471 ekor • Kerbau : 1 ekor • Kambing : 503 ekor
19	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	Pengawasan Terhadap Ternak Yang di Antar Pulaukan yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Sapi Jantan : 2000 ekor • Kerbau Jantan : 25 ekor
20	Pencacahan dan Pengkartuan Ternak	Pelaksanaan pencacahan dan pengkartuan ternak, Sebanyak : <ul style="list-style-type: none"> • Sapi : 8145 ekor • Kerbau : 566 ekor • Kuda : 1029 ekor • Kambing : 8225 ekor • Domba : 169 ekor
21	Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan	Pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemotongan ternak di Kota Bima : <ul style="list-style-type: none"> • Sapi Jantan : 1314 ekor • Sapi Betina : 31 ekor • Kerbau : - ekor • Kambing : 1661 ekor
22	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Pengadaan straw dan N2Cair : <ul style="list-style-type: none"> • Sapi Brangus : 26 dosis • Sapi Simental : 25 dosis • Sapi Limousin : 26 dosis • Sapi Brahman : 26 dosis • Sapi Bali : 103 dosis • N2-Cair : 50 liter <p>Jumlah Pelayanan Inseminasi Buatan : 340 Dosis Jumlah Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sapi Brangus : 24 ekor • Sapi Simental : 22 ekor • Sapi Limousin : 15 ekor • Sapi Brahman : 8 ekor



No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Sapi Bali : 162 ekor • Sapi Angus : - ekor • Sapi Ongole : - ekor
23	Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peternak tentang pengolahan pakan ternak sebanyak 8 kelompok tani ternak, dan peningkatan pengetahuan peternak tentang pembuatan kompos sebanyak 8 kelompok tani ternak.
24	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan	Terbangunnya sarana pemotongan untuk jagal lokal sebanyak 1 unit

Tabel 4. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan :				
	- Padi (GKP)	Ton	54.025	41.169	76,20
	- Jagung (PK)	Ton	5.113	12.106	236,77
	- Kedelai (BK)	Ton	2.716	1.309	48,20
	- Kacang Tanah (BK)	Ton	440	368	83,64
	- Kacang Hijau (BK)	Ton	12	62	516,67
	- Ubi Kayu (UB)	Ton	2.849	2.313	81,19
	- Ubi Jalar (UB)	Ton	111	44	39,64
Meningkatnya Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan :				
	- Tembakau	Ton	3,40	2,10	61,76
	- Jambu Mente	Ton	173,84	157,65	90,69
	- Kelapa	Ton	27,49	27,07	98,47
Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Peternakan :				
	- Produksi Daging	Ton	1.823	728	39,96
	- Produksi Kulit	Ton	45	62	137,88
	- Produksi Telur	Ton	258	183	70,82
Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Terampil	Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran (%)	%	45	50	111,11

Keterangan : Produksi Pertanian Tanaman Pangan adalah Angka Sementara Tahun 2017.

Penjelasan dari pencapaian dari masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis "Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan"

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan :				
	- Padi (GKP)	Ton	54.025	41.169	76,20
	- Jagung (PK)	Ton	5.113	12.106	236,77

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	- Kedelai (BK)	Ton	2.716	1.309	48,20
	- Kacang Tanah (BK)	Ton	440	368	83,64
	- Kacang Hijau (BK)	Ton	12	62	516,67
	- Ubi Kayu (UB)	Ton	2.849	2.313	81,19
	- Ubi Jalar (UB)	Ton	111	44	39,64

Keterangan : Produksi Pertanian Tanaman Pangan adalah Angka Sementara Tahun 2017.

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan*" dengan indikator kinerja Produksi Pertanian Tanaman Pangan melebihi dari target yang ditentukan yaitu rata-rata sebesar 154,61%, dimana untuk komoditi jagung dan kacang hijau produksinya diatas 100% sedangkan untuk komoditi lainnya seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar produksinya dibawah target, hal ini disebabkan oleh besarnya animo masyarakat untuk menanam komoditi jagung yang dikarenakan oleh harganya yang menjanjikan dan adanya program nasional dalam mendukung peningkatan produksi jagung, untuk produksi padi yang sebesar 41.169 ton dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan beras masyarakat masih terjadi surplus sebesar 6.955 ton dengan asumsi rata-rata konsumsi perkapita/pertahun sebesar 114,6 kg/kapita/tahun (*Biro Humas dan Informasi Publik Kementan RI Tanggal 28 September 2017*) dan jumlah penduduk Kota Bima sebesar 149.567 jiwa.

Pada 2017, Pemerintah Propinsi NTB mencanangkan target produksi padi menembus 2,4 juta ton. Dari target itu, produksi sampai bulan September hanya mencapai 2,3 juta ton, dengan luas lahan tanam dicanangkan seluas 475.000 hektare. Dari target tersebut, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pertanian Kota Bima menyumbang produksi padi sebesar 41.169 ton atau sebesar 1,72%.

2. Sasaran Strategis "*Meningkatnya Produksi Perkebunan*"

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan :				
	- Tembakau	Ton	3,40	2,10	61,76
	- Jambu Mente	Ton	173,84	157,65	90,69
	- Kelapa	Ton	27,49	27,07	98,47

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatnya Produksi Perkebunan*" dengan indikator kinerja Produksi Perkebunan rata-rata produksinya sekitar 83,64%, ini diakibatkan oleh masih rendahnya animo

masyarakat dalam mengusahakan komoditi perkebunan sebagai akibat dari masih rendahnya harga dari beberapa komoditi tersebut, untuk komoditi tembakau lahannya masih bersaing dengan komoditi tanaman pangan (padi dan jagung) sehingga perlu upaya khusus dalam pemberdayaan petani untuk membentuk kawasan khusus untuk produksi tanaman tembakau, begitu pula dengan komoditi perkebunan lainnya seperti jambu mete dan kelapa.

3. Sasaran Strategis "Meningkatnya Produksi Peternakan"

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Peternakan :				
	-. Produksi Daging	Ton	1.823	728	39,96
	-. Produksi Kulit	Ton	45	62	137,88
	-. Produksi Telur	Ton	258	183	70,82

Pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Produksi Peternakan" dengan indikator kinerja Produksi Peternakan rata-rata produksinya sekitar 82,89 %, ini disebabkan oleh produksi tersebut sangat tergantung dari besar kecilnya permintaan pasar. Untuk produksi daging yang hanya sebesar 728 ton (39,96%) ini diakibatkan oleh pemenuhan kebutuhan daging masyarakat Kota Bima sebagian besarnya berasal dari daging yang masuk dari Kabupaten Bima dan Dompu, ini terlihat dari daging yang dipasarkan di Pasar Raya Kota Bima sebagian besarnya berasal dari kabupaten tetangga.

Pada 2017, Pemerintah Propinsi NTB telah memproduksi daging sapi sebesar 10.444 ton (sumber : Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI). Dari jumlah produksi tersebut, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pertanian Kota Bima menyumbang produksi daging sapi sebesar 405,92 ton atau sebesar 3,89%.

4. Sasaran Strategis "Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Terampil"

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Terampil	Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran (%)	%	45	50	111,11

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Trampil” dengan indikator kinerja Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran pencapaiannya sekitar 111,11%, ini dikaitkan oleh adanya komitmen semua pihak untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya penyuluh melalui berbagai macam pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, ini diharapkan agar terus dilaksanakan dalam upaya memberikan yang terbaik bagi petani di Kota Bima dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi selama 5 (lima) tahun terakhir.

Analisis terhadap capaian indikator kinerja sasaran selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Produksi Pertanian Tanaman Pangan.

Tingkat produksi pertanian tanaman pangan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. Tingkat Produksi Pertanian Tanaman Pangan Dinas Pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir.

No.	Komoditi Tanaman Pangan (Ton)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Padi (GKP)	36.900	41.879	42.425	35.808	41.169
2.	Jagung (PK)	2.466	3.710	8.028	9.955	12.106
3.	Kedelai (BK)	1.855	2.129	2.228	1.697	1.309
4.	Kacang Tanah (BK)	212	319	281	383	368
5.	Kacang Hijau (BK)	6	11	11	110	62
6.	Ubi Kayu (UB)	1.374	3.372	2.679	2.600	2.313
7.	Ubi Jalar (UB)	76	95	79	0	44

Dari tabel diatas, terlihat bahwa produksi komoditi tanaman pangan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 13,49% dari tahun 2016, untuk semua komoditi (selain jagung dan ubi jalar) sedikit mengalami penurunan yang diakibatkan oleh banyaknya lahan yang alih komoditi ke tanaman jagung, penyebabnya adalah besarnya animo masyarakat untuk menanam komoditi jagung yang dikarenakan oleh harganya yang menjanjikan dan adanya program nasional dalam mendukung peningkatan produksi jagung.



2. Tingkat Produksi Perkebunan.

Tingkat produksi perkebunan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. Tingkat Produksi Perkebunan Dinas Pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir.

No.	Komoditi Perkebunan (Ton)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tembakau	-	3,40	2,10	2,10	2,10
2.	Jambu Mente	160,78	161,13	158,41	155,91	157,65
3.	Kelapa	66,38	25,71	25,56	27,45	27,07

Dari tabel diatas, terlihat bahwa produksi komoditi perkebunan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,36% dari tahun 2016, untuk semua komoditi (selain jambu mete) sedikit mengalami penurunan yang diakibatkan oleh masih rendahnya animo masyarakat dalam mengusahakan komoditi perkebunan sebagai akibat dari masih rendahnya harga dari beberapa komoditi tersebut.

3. Tingkat Produksi Peternakan.

Tingkat produksi peternakan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 7. Tingkat Produksi Peternakan Dinas Pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir.

No.	Komoditi Peternakan (Ton)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi Daging	973	825	535,5	607	728
2.	Produksi Kulit	25	30	61,87	47	62
3.	Produksi Telur	177	117	528,4	143	183

Dari tabel diatas, terlihat bahwa produksi komoditi perkebunan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 22,08% dari tahun 2016, untuk semua komoditi mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan sebagai akibat dari semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bima.

3. Pencapaian Kinerja Rencana Strategis Organisasi

Mulai dari visi sampai dengan kegiatan terdapat hubungan turunan, sehingga turunan dengan yang diturunkan selaras dan



mempunyai hubungan logis dan semua komponen di dalam renstra dapat diukur capaian kinerjanya. Komponen yang diukur kinerjanya hanya sasaran dan kegiatan. Akumulasi pencapaian sasaran, otomatis akan diwujudkan tujuan, akumulasi pencapaian tujuan tersebut bila berhasil maka secara otomatis berarti misi diemban dengan baik, dan bila misi dapat diemban dengan baik maka visi dapat diwujudkan. Semua komponen tersebut mempunyai kaitan logis dan sebagai strateginya adalah pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanian tahun 2017 sesuai sasaran yang telah ditetapkan sudah mengacu pada sasaran dan target yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2013 sampai dengan 2018 dalam upaya pencapaian visi organisasi.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Oleh karenanya perumusan dan pencapaian indikator kinerja kegiatan diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis. Artinya indikator kinerja kegiatan selaras dan mempunyai kaitan logis dengan indikator kinerja sasaran dan akumulasi pencapaian indikator kinerja kegiatan menghasilkan pencapaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dari 52 (lima puluh dua) kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan kegiatan tersebut efektif dalam menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan dan 100,00% telah dilaksanakan dengan baik dan efisien.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab dari berhasil dicapainya beberapa sasaran strategis yang telah ditentukan dipengaruhi oleh banyak faktor, dan faktor-faktor tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang baik beberapa stakeholder yang tergabung dalam rumpun hijau dalam melahirkan beberapa program/kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan petani serta peningkatan kualitas sumber daya petani dan aparatur pemerintah;
2. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk

- mempertahankan status lahan pertanian dalam upaya mempertahankan luas tanam pertanian;
3. Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/tanaman dalam upaya melestarikan sumber-sumber mata air yang dapat dipergunakan sebagai sumber air irigasi pertanian, perkebunan dan kebutuhan peternakan;
 4. Adanya partisipasi dan komitmen dari para penyuluh dan tenaga teknis dinas untuk terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani dan ternak dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
 5. Ketersediaan anggaran yang cukup dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;

Penyebab dari gagal dicapainya beberapa sasaran strategis yang telah ditentukan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akibat laju pembangunan daerah perkotaan yang begitu pesat, pada beberapa lokasi, lahan-lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan karena masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
2. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian;
3. Masih kurangnya kesadaran petani dan peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai anjuran;
4. Rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi, kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar;
5. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur, petani dan peternak;
6. Sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan yang masih terbatas.



5. Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam laporan ini adalah Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dalam menunjang pencapaian sasaran yang diinginkan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Pertanian Kota Bima berjumlah 71 orang dengan uraian sebagai berikut :

1.	Jabatan struktural eselon II	:	1	orang
2.	Jabatan struktural eselon III	:	6	orang
3.	Jabatan struktural eselon IV	:	29	orang
4.	Jabatan fungsional	:	37	orang
5.	Staf PNS	:	44	orang
6.	Staf Non PNS	:	44	orang
7.	THL PPL/Drh./SMD	:	44	orang
8.	Staf Sukarela	:	44	orang
	<u>Jumlah</u>	:	<u>134</u>	<u>orang</u>

Sedangkan dukungan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Dinas Pertanian Kota Bima adalah dengan uraian sebagai berikut :

1.	Lahan Sawah Irigasi	:	2.063	Ha
2.	Lahan Sawah Tadah Hujan	:	359	Ha
3.	Tegal / Kebun	:	5.897	Ha
4.	Ladang/ Huma	:	1.294	Ha
5.	Perkebunan	:	10	Ha
6.	Sementara Tidak Diusahakan	:	5	Ha
7.	Ditanami Pohon/ Hutan Rakyat	:	2.397	Ha
8.	Padang Pengembalaan/Padang Rumput	:	6	Ha
9.	Lain-lain	:	107	Ha
	<u>Jumlah</u>	:	<u>12.138</u>	<u>Ha</u>

6. Evaluasi kinerja proram/kegiatan

Evaluasi yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal, yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Pertanian terhadap pengukuran kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan guna memberi penjelasan lebih lanjut tentang :

- Efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan
- Efektivitas pencapaian sasaran

Dalam evaluasi ini dilakukan perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Dalam evaluasi juga diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang

menimbulkan kegagalan, serta langkah perbaikan (pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

1. Efektivitas Individual Kegiatan

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome*, *benefit* dan *impact* dari kegiatan yang bersangkutan. Efektivitas kegiatan dibagi atas dua macam, yaitu: (a) Efektivitas individual kegiatan; (b) Efektivitas terkait dengan pencapaian sasaran.

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact* yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas terkait dengan pencapaian sasaran merupakan kemampuan suatu kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

Selama tahun 2017 Dinas Pertanian melaksanakan 52 (lima puluh dua) kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerjanya diperoleh gambaran bahwa sebanyak 52 (lima puluh dua) kegiatan (100,00%) telah dilaksanakan secara efektif.

1) Kegiatan yang Efektif

Dalam laporan ini, suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome/benefit/impact* 100% atau lebih. Selama tahun 2017, kegiatan yang telah dilaksanakan secara efektif adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan.

2) Kegiatan yang Kurang Efektif

Dalam laporan ini, suatu kegiatan dikategorikan kurang efektif apabila hanya mampu mencapai angka rata-rata indikator *outcome/benefit/impact* <100% s.d 80%. Selama tahun 2017 tidak ada satupun kegiatan yang kurang efektif.



3) Kegiatan yang Tidak Efektif

Dalam laporan ini, kegiatan dikategorikan tidak efektif apabila hanya mampu mencapai angka rata-rata indikator outcome/benefit/impact kurang dari 80%. Selama tahun 2017 tidak ada kegiatan yang tidak efektif.

4) Kegiatan yang Tidak Diketahui Efektivitasnya

Kegiatan yang tidak diketahui efektivitasnya adalah kegiatan yang tidak mempunyai indikator outcome/benefit/impact, karena pengelola kegiatan belum mampu merumuskan outcome/benefit/impact dari kegiatan tersebut. Selama tahun 2017 tidak terdapat kegiatan yang tidak diketahui efektivitasnya.

2. Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian output dengan capaian input. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah indeks efisiensi target/rencana/anggaran, yaitu 1 (satu). Bila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien.

Selama tahun 2017, dari sejumlah 52 (lima puluh dua) kegiatan yang dilaksanakan, semua kegiatan (100,00%) telah dapat dilaksanakan dengan efisien, dan tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara efisien.



B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun anggaran 2017, kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima dibiayai dengan dana keseluruhan sebesar Rp. 13.296.327.643,56,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.732.010.168,00,- atau 95,76% Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai realisasi 100%. Selisih dana sebesar Rp. 564.317.476,- (4,24%) telah dikembalikan ke kas daerah.

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2017 untuk mendanai 12 (dua belas) program yang menyebar di 52 (lima puluh dua) kegiatan, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Penyerapan anggaran per program dan kegiatan tahun 2017

NO.	URAIAN BELANJA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
APBD KOTA BIMA		13.296.327.643,56	12.732.010.168,00	95,76
	BELANJA DAERAH	13.296.327.643,56	12.732.010.168,00	95,76
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.345.578.793,56	6.116.761.341,00	96,39
	BELANJA PEGAWAI	6.345.578.793,56	6.116.761.341,00	96,39
II	BELANJA LANGSUNG	6.950.748.850	6.615.248.827	95,17
	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.433.559.850	5.099.415.827	93,85
	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	1.517.189.000	1.515.833.000	99,91
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	801.460.100	659.640.000	82,30
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	79.400.000	45.766.698	57,64
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	12.950.000	7.016.600	54,18
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	64.272.000	64.272.000	100,00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31.200.000	28.800.000	92,31
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.800.000	6.300.000	71,59
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.400.000	96.248.600	95,87
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.447.000	44.943.700	96,76
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.426.400	3.334.550	97,32
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.200.000	12.200.000	100,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.440.000	3.720.000	83,78
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.987.500	14.987.500	100,00
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	386.637.200	295.750.352	76,49
15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	35.100.000	35.100.000	100,00
B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	705.055.850	665.730.150	94,42
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	182.500.000	169.455.000	92,85
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	74.405.600	68.129.500	91,57
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	140.308.250	140.087.250	99,84
4	Pengadaan Mebeleur	62.450.000	54.670.000	87,54
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50.392.000	39.818.400	79,02



NO.	URAIAN BELANJA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	195.000.000	193.570.000	99,27
C.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	73.515.000	72.710.000	98,90
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	73.515.000	72.710.000	98,90
D.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	45.615.000	31.538.000	69,14
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000	5.928.000	29,64
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	20.815.000	20.810.000	99,98
3	Pelaksanaan Penilaian AKJG	4.800.000	4.800.000	100,00
E.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	117.700.000	117.425.000	99,77
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.700.000	36.425.000	99,25
2	Penyusunan Lap. Keuangan Semesteran	8.000.000	8.000.000	100,00
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.000.000	8.000.000	100,00
4	Penyusunan Rencana Kerja/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	100,00
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	25.000.000	25.000.000	100,00
F.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	532.621.700	509.367.700	95,63
1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	36.192.900	36.132.900	99,83
2	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	134.920.000	117.126.000	86,81
3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	7.365.000	7.365.000	100,00
4	Pelaksanaan PEDANA PENAS dan Kontak Tani Andalan	278.798.800	278.798.800	100,00
5	Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani, Petani, Kelompok PUAP dan Pekarangan	75.345.000	69.945.000	92,83
G.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)	3.507.818.800	3.439.964.227	98,07
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	148.550.000	122.080.077	82,18
2	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian	34.836.300	34.095.800	97,87
3	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	135.186.000	126.733.700	93,75
4	Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan	224.131.500	211.576.000	94,40
5	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	64.378.000	51.998.000	80,77
6	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	2.900.737.000	2.893.480.650	99,75
H.	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	62.290.150	61.870.650	99,33
1	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	42.918.900	42.636.900	99,34
2	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	19.371.250	19.233.750	99,29
I.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	262.661.500	234.969.300	89,46
1	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	51.424.500	48.582.000	94,47
2	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	39.515.000	39.515.000	100,00



NO.	URAIAN BELANJA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	171.722.000	146.872.300	85,53
J.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	78.222.500	76.317.000	97,56
1	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	78.222.500	76.317.000	97,56
K.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	428.499.500	411.968.400	96,14
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	254.100.000	252.631.000	99,42
2	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	71.825.000	64.262.900	89,47
3	Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan	102.574.500	95.074.500	92,69
L.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	335.288.750	333.748.400	99,54
1	Pembibitan dan Perawatan Ternak	72.970.000	71.519.900	98,01
2	Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak	17.448.750	17.448.500	100,00
3	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan	244.870.000	244.780.000	99,96

NO.	URAIAN BELANJA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH BANTUAN	REALISASI BANTUAN	%
APBN				
1	Pengelolaan Produksi Tanaman Seralia (Padi Inhibrida 400 Ha)	6.000.000	6.000.000	100,00
2	Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	220.980.000	125.306.000	56,70
3	Gerakan Peningkatan Produksi Kedelai	252.180.000	252.180.000	100,00
4	Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (2 Unit)	350.000.000	350.000.000	100,00
5	Bantuan Bibit Jagung Program PAT Tanaman Pangan dan Program Integrasi Perkebunan dan Tanaman Pangan (Ha)	4.000	4.000	100,00
6	Bantuan Benih Padi Inbrida (Ha)	400	400	100,00
7	Bantuan Benih Padi Bersubsidi (Ha)	1.675,60	1.675,60	100,00
8	Bantuan Corn Sheller	5	5	100,00
9	Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Traktor Roda 2) (Unit)	7	7	100,00
10	Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Traktor Roda 2) (Unit)	20	20	100,00
11	Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Pompa Air) (Unit)	10	10	100,00
12	Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Pompa Air) (Unit)	20	20	100,00
13	Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Rice Transplanter) (Unit)	2	2	100,00
14	Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Hand Sprayer) (Unit)	44	44	100,00
15	Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Hand Sprayer) (Unit)	2	2	100,00
16	Alat Tanam Jagung Dorong	2	2	100,00
17	Bantuan Benih Dari Cadangan Benih Nasional (CBN) - Pemulihan Pasca Banjir di Kota Bima (Ha)	416	416	100,00



NO.	URAIAN BELANJA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH BANTUAN	REALISASI BANTUAN	%
APBN				
18	Sekolah Lapang Mendukung Upsus (1 BPP)	31.700.000	31.700.000	100,00
19	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (1 KEP)	3.500.000	3.500.000	100,00
20	Pendampingan Kelompok Tani di Sentra Pangan (5 WKPP)	12.600.000	12.600.000	100,00
21	Sapi Induk Wajib Bunting/SIWAB (Ekor)	1.500	1.029	68,60

Penyerapan anggaran per program dan kegiatan tahun 2017 seperti yang tertera pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa secara garis besar tata kelola keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif serta telah meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan anggaran yang merugikan keuangan negara.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kota Bima. Media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Total Belanja Daerah dalam APBD Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2017 sebesar Rp. 13.296.327.643,56,- dapat terealisasi sebesar Rp. 12.732.010.168,00,- atau 95,76%. Total realisasi belanja yang mencapai 95,76% sampai dengan berakhirnya tahun anggaran menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran, namun hal tersebut tidak mempengaruhi pencapaian sasaran dan kinerja Dinas Pertanian Kota Bima secara signifikan.

Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2017 mencapai 96,16%, tidak terpenuhi 100% karena terdapat beberapa unit potensi PAD yang tidak bisa dipenuhi.

Walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2017 ternyata masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Oleh karena itu penyempurnaan strategi dimasa yang akan datang perlu dilaksanakan terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mengacu pada perkembangan lingkungan yang terjadi serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dengan demikian maka perencanaan jangka menengah daerah yang disusun mampu mewisdomahi setiap aspirasi seluruh masyarakat. Dengan



menyempurnakan mekanisme perencanaan berbasis partisipasi masyarakat diharapkan Rencana Kinerja Tahunan melalui berbagai program dan kegiatan benar-benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai semaksimal mungkin.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2017 ini, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang.

Raba-Bima, Desember 2017

Kepala Dinas Pertanian Kota Bima,



IR. HJ. RINI INDRIATI
NIP. 19650302 198603 1 024

Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Pertanian Kota Bima

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan : -. Padi (GKP) -. Jagung (PK) -. Kedelai (BK) -. Kacang Tanah (BK) -. Kacang Hijau (BK) -. Ubi Kayu (UB) -. Ubi Jalar (UB)	54.025 Ton 5.113 Ton 2.716 Ton 440 Ton 12 Ton 2.849 Ton 111 Ton	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Pelaksanaan PEDANA PENAS dan Kontak Tani Andalan Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani, Petani, Kelompok PUAP dan Pekarangan	532.621.700 36.192.900 134.920.000 7.365.000 278.798.800 75.345.000
Meningkatnya Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan : -. Tembakau -. Jambu Mente -. Kelapa	3,40 Ton 173,84 Ton 27,49 Ton	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Pengembangan perbenihan/perbibitan Pengembangan sistem informasi pasar Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	3.507.818.800 148.550.000 34.836.300 135.186.000 224.131.500 64.378.000 2.900.737.000
Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Peternakan : -. Produksi Daging -. Produksi Kulit -. Produksi Telur	1.823 Ton 45 Ton 258 Ton	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	62.290.150 42.918.900 19.371.250
Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Terampil	Persentase Penyuluh yang terampil dalam penerapan teknologi pertanian sesuai anjuran	45 %	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	262.661.500

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
			Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	51.424.500
			Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	39.515.000
			Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	171.722.000
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	78.222.500
			Penyusunan program penyuluhan pertanian	78.222.500
			Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	428.499.500
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	254.100.000
			Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	71.825.000
			Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan	102.574.500
			Program peningkatan produksi hasil peternakan	335.288.750
			Pembibitan dan perawatan ternak	72.970.000
			Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	17.448.750
			Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan	244.870.000
JUMLAH ANGGARAN				5.207.402.900

Raba-Bima, Desember 2017
Kepala Dinas Pertanian Kota Bima,



IR. HJ. RINI INDRIATI

NIP. 19650302 198603 1 024

Lampiran 2. Penetapan Kinerja Tahun 2017 Dinas Pertanian Kota Bima

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan :	
	- Padi (GKP)	54.025 Ton
	- Jagung (PK)	5.113 Ton
	- Kedelai (BK)	2.716 Ton
	- Kacang Tanah (BK)	440 Ton
	- Kacang Hijau (BK)	12 Ton
	- Ubi Kayu (UB)	2.849 Ton
- Ubi Jalar (UB)	111 Ton	
Meningkatnya Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan :	
	- Tembakau	3,40 Ton
	- Jambu Mente	173,84 Ton
	- Kepala	27,49 Ton
Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Peternakan :	
	- Produksi Daging	1.823 Ton
	- Produksi Kulit	45 Ton
	- Produksi Telur	258 Ton
Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Terampil	Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran	45 %

Jumlah Anggaran : Rp 5.207.402.900

Raba-Bima, Desember 2017

Kepala Dinas Pertanian Kota Bima,



IR. HJ. RINI INDRIATI
NIP. 19650302 198603 1 024

Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2017 Dinas Pertanian Kota Bima

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan :			
	- Padi (GKP)	54.025 Ton	41.169 Ton	76,20
	- Jagung (PK)	5.113 Ton	12.106 Ton	236,77
	- Kedelai (BK)	2.716 Ton	1.309 Ton	48,20
	- Kacang Tanah (BK)	440 Ton	368 Ton	83,64
	- Kacang Hijau (BK)	12 Ton	62 Ton	516,67
	- Ubi Kayu (UB)	2.849 Ton	2.313 Ton	81,19
- Ubi Jalar (UB)	111 Ton	44 Ton	39,64	
Meningkatnya Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan :			
	- Tembakau	3,40 Ton	2,10 Ton	61,76
	- Jambu Mente	173,84 Ton	157,65 Ton	90,69
	- Kepala	27,49 Ton	27,07 Ton	98,47
Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Peternakan :			
	- Produksi Daging	1.823 Ton	728,48 Ton	39,96
	- Produksi Kulit	45 Ton	62,05 Ton	137,88
	- Produksi Telur	258 Ton	182,72 Ton	70,82
Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Terampil	Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran	45 %	50 %	111,11
CAPAIAN KINERJA				120,93

Raba-Bima, Desember 2017

Kepala Dinas Pertanian Kota Bima,



IR. HJ. RINI INDRIATI

NIP. 19650302 198603 1 024